

TINJAUAN KEBERHASILAN PEMBERIAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT PADA PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT WILAYAH SUBANG TAHUN 2022

Oleh:

Junianto Eka Saputra
KPPBC TMP A Purwakarta

E-mail:

juansaputra0406@gmail.com

ABSTRACT

The provision of Bonded Zone facilities to export-oriented industrial companies aims to support increased investment, exports, development of national industry, and increased employment. This study aims to review the success rate of providing Bonded Zone facilities received by Bonded Zone companies in Subang Regency and the strategy implemented by KPPBC TMP A Purwakarta to increase the success of providing Bonded Zone facilities. This study uses a quantitative approach with a success rate calculation based on the formula in the KPI manual that has been set for 2022. Based on the calculation results, the success rate of granting bonded zone facilities to Bonded Zone companies in the Subang Region has exceeded the set target. The realization of this level of success indicates that the objective of providing facilities to support increased investment, exports, development of the national industry, and increased employment has been achieved. KPPBC TMP A Purwakarta has implemented a strategy for internal employees and Bonded Zone companies to increase the success rate of providing Bonded Zone facilities.

Keywords: *Bonded Zone, Success, Strategy*

ABSTRAK

Pemberian fasilitas Kawasan Berikat kepada perusahaan industri berorientasi ekspor bertujuan untuk mendukung peningkatan investasi, ekspor, pengembangan industri nasional, dan peningkatan serapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang diterima pengusaha fasilitas Kawasan Berikat di Kabupaten Subang dan strategi yang dijalankan KPPBC TMP A Purwakarta untuk meningkatkan keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perhitungan tingkat keberhasilan berdasar formula pada manual IKU yang telah ditetapkan pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan berikat kepada pengusaha Kawasan Berikat di Wilayah Subang telah melebihi target yang ditetapkan. Dari realisasi tingkat keberhasilan tersebut menandakan bahwa tujuan pemberian fasilitas untuk mendukung peningkatan investasi, ekspor, pengembangan industri nasional, dan peningkatan serapan tenaga kerja telah tercapai. KPPBC TMP A Purwakarta memiliki strategi yang dijalankan kepada internal pegawai dan pengusaha Kawasan Berikat meningkatkan tingkat keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat.

Kata Kunci: **Kawasan Berikat, Keberhasilan, Strategi**

1. PENDAHULUAN

Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi

dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Daya konsumsi masyarakat dan trend ekspor yang masih rendah menjadi penyebab Indonesia membutuhkan keterlibatan

investor asing. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Subang, karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah.

Nilai investasi PMA yang masuk ke wilayah Kabupaten Subang di Tahun 2022 mencapai Rp996.473.900.444 atau 22% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mendorong pertumbuhan investasi, Kabupaten Subang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan upaya untuk meningkatkan rasio kemudahan berusaha, melalui layanan yang prima.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Subang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan, yaitu memberikan fasilitas penangguhan, pembebasan atau pengembalian terhadap bea masuk, PPN, dan Pajak Dalam Rangka Impor kepada pelaku industri manufaktur. Hal ini dapat memberikan dampak efisiensi dalam kegiatan produksi sehingga harga jual barang menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.

Bentuk konkret insentif fiskal ini antara lain Fasilitas Kawasan Berikat (KB). Per Desember 2022, terdapat 30 pengusaha Kawasan Berikat di Wilayah Subang di bawah wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta (KPPBC TMP A Purwakarta). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa Kawasan Berikat ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan

Berikat yang diterima pengusaha Kawasan Berikat di Kabupaten Subang dan strategi yang dijalankan KPPBC TMP A Purwakarta untuk meningkatkan keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai (Kemenkeu, 2021). Barang impor yang dimasukkan ke KB mendapatkan penangguhan bea masuk serta pembebasan cukai dan/atau pajak dalam rangka impor, sehingga dalam proses impor tidak lagi terdapat hambatan tarif.

Apabila hasil produksi Kawasan Berikat diekspor maka Kawasan Berikat dibebaskan dari tanggung jawab melunasi bea masuk yang sebelumnya ditangguhkan. Insentif fiskal tersebut diharapkan mendukung efisiensi biaya produksi.

Keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat telah terdokumentasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPPBC TMP A Purwakarta dengan nama “Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan (1a-CP)” dan telah ditetapkan dalam manual IKU Nomor 8/BC.22/2022. Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%) Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan

membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%). Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.
3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%), Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4). Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan *fillet* dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$.
4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%), Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi

dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4). Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai

CIF (tidak termasuk impor barang modal). Apabila tidak terdapat perusahaan KB yang melakukan ekspor secara tidak langsung, maka bobot 20% ditambahkan ke komponen pada angka 3 (rasio ekspor terhadap impor), sehingga bobotnya menjadi 60%. Begitu pula sebaliknya.

Penentuan perhitungan untuk komponen 3 dan 4 menggunakan tabel kondisional berikut:

Tabel 1 Kondisi Penentuan Perhitungan Komponen 3 dan 4

Kondisi	Impor	Ekspor		BC 2.7		Rasio yang Dihitung
		Kegiatan	Rasio	Kegiatan	Rasio	
I	Ada	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Tidak Ada	-	K 3
II	Ada	Ada	Memenuhi	Ada	Memenuhi/Tidak Memenuhi	K 3
III	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Memenuhi	K 4
IV	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Tidak Memenuhi	K Gabungan (3 dan 4) ^a
V	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	K 4
VI	Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	-	Ada/ Tidak Ada	-	N/A (Rasio tidak dapat dihitung) ^b

a) Pemenuhan rasio:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC 3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC 2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC 2.3)}} \geq 1,55$$

Apabila perusahaan KB memenuhi rasio komponen gabungan, maka perusahaan tersebut dikategorikan memenuhi rasio (nilai barang produksi : impor)

b) Tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk komponen 3 dan 4, namun dilakukan analisis terhadap kondisi terkait. Apabila seluruh perusahaan dalam suatu kantor masuk kategori ini, maka analisis dapat diakui sebagai realisasi capaian komponen IKU dengan bobot (60%).

Baik rasio untuk komponen 3 maupun komponen 4 dapat menggunakan

perbandingan rasio secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan:

- Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.
- Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor secara langsung (BC 3.0) maupun tidak langsung (BC 2.7) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara

multiyear, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.

- d. Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

5. Asistensi (bobot 15%), Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor). Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2 Poin Komponen Asistensi

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3 / Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, dan/atau 4.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, 3, dan/atau 4 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

6. Tindak Lanjut (bobot 15%), Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional

usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab seluruh perusahaan KB aktif beroperasi, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen asistensi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari sejumlah buku literatur dan referensi lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Pada Bulan Desember 2022, terdapat 30 pengusaha Kawasan Berikat di Kabupaten Subang di bawah wilayah kerja KPPBC TMP A Purwakarta dengan rincian data keberhasilan sesuai dengan Tabel 3.

Realisasi Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan adalah 102,98% mencapai target yang ditentukan pada Tahun 2022 sebesar 82,5% yang menandakan bahwa pemberian fasilitas Kawasan berikat ke pengusaha Kawasan Berikat telah berjalan secara optimal yang ditunjukkan pada matriks perhitungan sesuai dengan Tabel 4.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan berikat terdiri dari 6 komponen, yaitu:

- 1) Keberlangsungan usaha perusahaan KB (10%). Realisasi s.d Desember 2022, untuk komponen ini adalah terdapat 30 perusahaan KB yang aktif beroperasi dari total 30 perusahaan KB yang ada selama tahun berjalan. Realisasi untuk komponen ini adalah 100%.
- 2) Jumlah tenaga kerja (20%). Realisasi s.d Desember 2022, untuk komponen ini adalah terdapat 30 perusahaan KB dengan tenaga kerja yang tetap atau bertambah dari total 30

perusahaan KB yang aktif yang beroperasi. Realisasi untuk komponen ini adalah sebesar 100%.

- 3) Rasio ekspor terhadap impor (40%). Realisasi s.d Desember 2022, untuk komponen ini adalah terdapat 21 perusahaan KB dengan rasio yang telah mencapai rasio ditargetkan (min. 1.75) dari total 25 perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung. Realisasi untuk komponen ini adalah sebesar 84%.
- 4) Rasio produksi terhadap impor (20%). Realisasi s.d Desember 2022, untuk komponen ini adalah terdapat 3 perusahaan KB dengan rasio yang telah mencapai rasio yang ditargetkan (min. 1.5) dari total 4 perusahaan KB yang aktif beroperasi. Realisasi untuk komponen ini adalah sebesar 75%.
- 5) Asistensi (15%). Realisasi s.d Desember 2022, untuk komponen ini adalah total poin asistensi adalah sebesar 7,5 poin asistensi dari total 12 perusahaan yang perlu dilakukan asistensi. Perhitungan untuk komponen ini adalah sebesar 62,5%. Realisasi untuk komponen ini adalah sebesar 9,38%. Seluruh pengusaha Kawasan Berikat di Wilayah Subang aktif beroperasi, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen asistensi. Realisasi akhir untuk komponen ini adalah sebesar 24,38%.
- 6) Tindak Lanjut (15%). Realisasi s.d Desember 2022, komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan karena seluruh pengusaha Kawasan Berikat di Wilayah Subang aktif beroperasi, maka bobot 15% ditambahkan ke komponen asistensi.

Tabel 3 Data Keberhasilan Kawasan Berikat Periode Januari s.d. Desember 2022

No.	Nama PT	Jumlah Tenaga Kerja				Kegiatan Perusahaan			
		Awal Periode*		Periode Berjalan		Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3)**	Terdapat BC 3.0 (Ekspor Langsung)	Terdapat BC 2.7 (Ekspor Tidak Langsung)	Pengurang dari Pembilang (Untuk Perhitungan Rasio)
		WNI	WNA	WNI	WNA		Akumulasi Nilai Ekspor (FOB)	Akumulasi Nilai Barang (BC 2.7 Keluar)	Akumulasi Nilai Barang (BC 2.7 masuk)
1	PT TTI	32.704	79	29.818	94	2.127.645.134.360,76	3.631.303.539.439,14	240.282.993.966,45	
2	PT IM	802	2	840	3	66.788.519.720,04	212.644.712.499,66		1.575.534.869,05
3	PT YI	339	3	671	2	13.925.725.477,47	69.270.801.170,40		1.640.323,20
4	PT SIL	208	-	218	-	36.447.163.874,96	99.667.974.352,00		
5	PT CSI	1.426	5	821	5	154.015.958.217,84	369.559.845.644,36	3.113.590.926,08	33.843.950.889,16
6	PT PIO	2.855	10	2.962	11	480.593.018.098,54	847.494.906.090,51	14.868.547.113,56	33.232.973.837,57
7	PT DG	3.296	21	2.510	19	435.154.134.817	645.375.609.880		
8	PT ET	807	4	858	5	507.211.922.539,51	2.921.140.400,08		13.508.500,00
9	PT DK	539	4	575	4	9.469.225.742,68	70.775.438.117,04		41.039.210,00
10	PT PGI	785	7	739	5	106.546.427.240,17	137.713.434.777,92		1.910.458.795,00
11	PT SI	2.643	12	2.826	14	471.341.071.898	1.093.754.787.907		30.558.025.908
12	PT SUI	2.125	3	1.201	3	79.715.685.016	315.130.895.932		32.139.955.768
13	PT LBAM	1.200	1	791	2	105.417.927.923	293.983.864.545	2.799.116.130,22	1.047.310.497
14	PT MSL	225	8	652	25	259.750.292.914	259.393.194.584		
15	PT MTI	12	23	138	31	38.277.876.229,94	791.925.210,66		
16	PT KYHI	411	5	455	5	23.408.778.141,17	67.886.468.240,92		
17	PT UJI	1.496	11	1.486	14	59.449.042.547,86	225.563.142.629,07		
18	PT PPN	2.941	7	2.674	7	370.685.695.855	645.518.261.719		169.588.853
19	PT WG	2.598	7	1.507	7	109.001.028.303,62	511.832.672.783,22	12.198.227.344,92	3.953.412.994,22
20	PT H	3.951	16	2.998	22	649.079.508.883,09	5.809.593.129.062,94	31.287.944.771,49	17.574.044.458,52
21	PT SHI	1.705	5	2.503	5	191.244.792.129,78	508.953.237.288,30		1.461.759.639,44

22	PT HDI	961	4	782	4	105.827.372.246,30	214.351.495.897,71	34.743.676.146,00	38.524.538.431,27
23	PT SP	682	1	718	1	186.269.220.507,51	483.897.466.388,39		
24	PT DYN	100	3	78	3	2.355.998.327,00	10.869.843,10	857.113.273,66	
25	PT SYI	133	2	133	2			4.313.485.106,50	32.917.432.506,22
26	PT CTJ	1984	5	1238	4	204.647.411.400,00	321.338.799.320,00	11.907.560.904,99	5.669.183.561,32
27	PT TKSG	1046	4	698	4	125.013.857.994,09	272.377.154.142,85	5.604.748.576,88	1.306.843.852,81
28	PT SEI	227	6	255	6	64.163.124.045,00	60.044.330.511,00	113.261.237.557,35	4.453.411.949,10
29	PT YWI	1318	7	844	5	139.702.938.972,79	313.968.821.958,97	1.037.456.342,98	4.635.717.078,77
30	PT SOI	565	4	460	5	137.970.891.844,44	298.946.149.374,42	2.180.447.986,73	8.454.808.692,00

Tabel 4 Matriks Perhitungan Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat pada Pengusaha Kawasan Berikat di Wilayah Subang Tahun 2022

No.	Nama PT	Komp. 1	Komp. 2			Kondisi (Untuk Komp 3 atau 4)	Komponen 3			Komponen IV		Komponen V			Komponen V	
		Aktif Beroperasi	Perubahan Tenaga Kerja	Kesulitan Ekonomi	Tenaga Kerja Tetap/ bertambah		Rasio	Maklon & pengolahan sederhana	Memenuhi Rasio	Rasio	Memenuhi Rasio	Perlu Asistensi	Pelaksanaan & Hasil	Poin	Pelaksanaan	Jumlah TL
1	PT TTI	Ya	0,91	Tidak	Ya	II	1,71	Ya	Ya			Tidak				
2	PT IM	Ya	1,05		Ya	I	3,16		Ya			Tidak				
3	PT YI	Ya	1,97		Ya	I	4,97		Ya			Ya	Telah Dilaksanakan	0,5		
4	PT SIL	Ya	1,05		Ya	I	2,73		Ya			Ya	Telah Dilaksanakan	0,5		
5	PT CSI	Ya	0,58	Tidak	Ya	II	2,18		Ya			Ya	Telah Memenuhi Seluruh Komponen	1		
6	PT PIO	Ya	1,04		Ya	II	1,69	Ya	Ya			Tidak				
7	PT DG	Ya	0,76	Tidak	Ya	I	1,48	Ya	Ya			Tidak				
8	PT ET	Ya	1,06		Ya	I	0,01	Tidak	Tidak			Ya	Telah Dilaksanakan	0,5		
9	PT DK	Ya	1,07		Ya	I	7,47		Ya			Tidak				
10	PT PGI	Ya	0,94	Tidak	Ya	I	1,27	Ya	Tidak			Ya	Telah Dilaksanakan	0,5		
11	PT SI	Ya	1,07		Ya	I	2,26		Ya			Ya	Telah Memenuhi Seluruh Komponen	1		
12	PT SUI	Ya	0,57	Tidak	Ya	I	3,55		Ya			Tidak				
13	PT LBAM	Ya	0,66	Tidak	Ya	II	2,78		Ya			Tidak				

14	PT MSL	Ya	2,91		Ya	I	1,00	Ya	Tidak		Ya	Telah Dilaksanakan	0,5
15	PT MTI	Ya	4,83		Ya	I	0,02	Ya	Tidak		Ya	Telah Dilaksanakan	0,5
16	PT KYHI	Ya	1,11		Ya	I	2,90		Ya		Tidak		
17	PT UJI	Ya	1,00	Tidak	Ya	I	3,79		Ya		Ya	Telah Memenuhi Seluruh Komponen	1
18	PT PPN	Ya	0,91	Tidak	Ya	II	1,74	Ya	Ya		Ya	Telah Dilaksanakan	0,5
19	PT WG	Ya	0,58	Tidak	Ya	II	4,66		Ya		Tidak		
20	PT H	Ya	0,76	Tidak	Ya	II	8,92		Ya		Tidak		
21	PT SHI	Ya	1,47		Ya	I	2,65		Ya		Tidak		
22	PT HDI	Ya	0,81	Tidak	Ya	IV				1,98976	Ya	Tidak	
23	PT SP	Ya	1,05		Ya	I	2,60		Ya		Tidak		
24	PT DYN	Ya	0,79	Tidak	Ya	IV				0,36841	Tidak	Ya	Telah Dilaksanakan 0,5
25	PT SYI	Ya	1,00		Ya	VI					Ya	Telah Dilaksanakan	0,5
26	PT CTJ	Ya	0,62	Tidak	Ya	IV				1,60069	Ya	Tidak	
27	PT TKSG	Ya	0,67	Tidak	Ya	II	2,17		Ya		Tidak		
28	PT SEI	Ya	1,12		Ya	III				1,6958	Ya	Tidak	
29	PT YWI	Ya	0,64	Tidak	Ya	II	2,21		Ya		Tidak		
30	PT SOI	Ya	0,82	Tidak	Ya	II	2,11		Ya		Tidak		
	Perhitungan	100%		100,00%				84,00%		75,00%		62,50%	#DIV/0!
	Bobot	10%		20%				40%		20%		15%	15%
	Capaian	10,00%		20,00%				33,60%		15,00%		9,38%	15,00%
	Total Capaian			102,98%									

Stretegi KPPBC TMP A Purwakarta untuk meningkatkan keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat

Melalui kegiatan komunikasi dan edukasi ke pengusaha Kawasan berikat, KPPBC TMP A Purwakarta berupaya untuk menjalin dan mewujudkan kerja sama, komunikasi, dan pelayanan yang semakin baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada penerima fasilitas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan industri.

KPPBC TMP A Purwakarta melalui kegiatan *Customs Visit Customer* mengunjungi perusahaan untuk lebih mengenal proses bisnis, mengetahui kendala yang dialami perusahaan penerima fasilitas secara langsung, dan pemeriksaan kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat terhadap peraturan di bidang fasilitas Kawasan Berikat. Kegiatan ini dapat menjadi bahan masukan sekaligus memberi edukasi kepada perusahaan agar tetap menjalankan Kewajiban Fasilitas Kawasan berikat sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPPBC TMP A Purwakarta mengadakan kegiatan Bulan Edukasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Kegiatan ini diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan edukasi bagi para pengguna jana agar nantinya dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik ketika bekerja, antara petugas bea cukai dengan pengguna jasa. Selain itu, diharapkan dengan adanya keglatan ini dapat memberikan edukasi ke masyarakat dan meningkatkan kesadaran pegawai DIBC akan pentingnya fasilitas TPB.

Kegiatan dalam Bulan Edukasi TPB meliputi publikasi, Selasar (Selasa Kamis Belajar) dan *Sharring Session*.

KPPBC TMP A Purwakarta mengadakan kegiatan yang diperuntukan kepada internal pegawai, meliputi *sharing session, inhouse training, FGD* dan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam melakukan pengawasan pada perusahaan Kawasan Berikat.

Topik yang dibahas dalam kegiatan ini disesuaikan dengan kepentingan permasalahan yang dihadapi petugas yang melayani dan mengawasi pengusaha Kawasan Berikat.

5. SIMPULAN

Sebagai implementasi dari salah satu tugas dan fungsi DJBC secara umum, yaitu *Industrial Assistance dan Trade Facilitator*, KPPBC TMP A Purwakarta berupaya meningkatkan pertumbuhan industri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Berdasarkan Matriks Data dan Informasi Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat s.d Q4 2022 yang telah dikumpulkan serta perhitungan tingkat keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan formula pada Manual IKU, dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk tingkat keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan berikat kepada perusahaan penerima fasilitas di Wilayah Subang adalah sebesar 102,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83.5%. Dari realisasi tingkat keberhasilan tersebut menandakan bahwa tujuan pemberian fasilitas untuk mendukung peningkatan investasi, ekspor, pengembangan industri nasional, dan peningkatan serapan tenaga kerja telah

tercapai.

Strategi KPPBC TMP A Purwakarta untuk meningkatkan keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat adalah dengan mengadakan kegiatan komunikasi dan edukasi yang ditujukan untuk internal pegawai dan pengusaha Kawasan Berikat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Barlianto, Adhiana Denandra & Indri Riesfandiari.(2021). Evaluasi Manfaat Kawasan Berikat Mandiri Dalam Meningkatkan Kinerja Logistik Dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.1, (2021), Hal.136-151

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Subang.(2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang KPPBC TMP A Purwakarta .(2022). Bulan Edukasi TPB.KPPBC TMP A Purwakarta.

<https://www.instagram.com/p/Ckcv-5P0et/>

KPPBC TMP A Purwakarta .(2022). Laporan Kinerja 2022. Purwakarta: KPPBC TMP A Purwakarta

KPPBC TMP A Purwakarta .(2022). Data Keberhasilan Kawasan Berikat di Wilayah Subang.

Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat